

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adioetomo, Sri Moertiningsih & Elda Luciana Pardede, 2025, "Older Persons in Indonesia: Sources of Income and Social Protection", in S. I. Rajan (ed.), *Handbook of Aging, Health and Public Policy*, Springer, Singapore.
- Adnan, Gunawan, 2020, *Filsafat Umum*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ashyadi, Zaeni, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, <https://www.latestlaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Blacks-Law-Dictionery.pdf>.
- Dewata, Mukti F. N. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gill, Indermit S., Truman Packard, & Juan Yermo, 2004, *Keeping the Promise of Social Security in Latin America*, Stanford University Press & The World Bank, Washington.
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1987, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurhadi, Fathur Rahman, Amad Ma'ruf, & Kafa Abdallah Kafa, 2004, *Jaminan Sosial di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Tantangan Masa Depan*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, <https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/21813>.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahab, Zulaini, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wijayanti, Asri, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Willmore, Larry, 2001, "Three Pillars of Pensions: Is There a Need for Mandatory Contributions?", in OECD Private Pensions Conference 2000, *Private Pension Series No. 3*, OECD, Paris.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3112).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1709).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1198).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451).

C. Konvensi Internasional

Konvensi International Labour Organizations Nomor 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasaional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juni 2022.

E. Jurnal

Agus, Dede, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.

- Arifianto, Alex, “The New Indonesian Social Security Law: A Blessing or Curse for Indonesians”, *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 23, No. 1, 2006.
- Dixon, John, “National Provident Funds in Asia: Something Old, Something Borrowed, Something New”, *Canadian Review of Social Policy*, No. 38, 1996.
- Hickey, Sam, “Relocating Social Protection within a Radical Project of Social Justice”, *European Journal of Development Research*, Vol. 26, No. 3, 2014.
- Hutabarat, Marshall J. C., “Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan”, *Dharmasiswa*, Vol. 2, No. 1, Maret 2022.
- James, Estelle, “New Models for Old-Age Security: Experiments, Evidence, and Unanswered Questions”, *The World Bank Research Observer*, Vol. 13, No. 2, 1998.
- Pound, Roscoe, “Law in Books and Law in Action”, *American Law Review*, Vol. 44, No. 12, 1910.
- Pratama, Juwita P., Lita Tyesta ALW, Sekar A.G. Pinilih, “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi* 19, No. 4, Desember 2022.
- Sukmana, Oman, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Wahyuni, Neni Sri, “Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun bagi Pekerja Indonesia”, *Jurnal Jamsostek*, Vol. 2, No. 1, Juni 2024.
- Wijayanti, Putri & Lina Miftahul J., “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia”, *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 1, November 2019.

F. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Alexandra, Natashya, 2015, Perbandingan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Pada PT. Jamsostek dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Perwira, Daniel, Alex Arifianto, Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto, 2003, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, *Kertas Kerja*, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Siregar, Gina Pratiwi Br, 2022, *Analisis Yuridis Proses Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dalam Memberikan Pelindungan Hukum Jaminan Hari Tua Pekerja/Buruh yang Diberhentikan Sebelum Memasuki Usia Pensiun 56 (Lima Puluh Enam) Tahun*, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tsuruga, Ippei & Simon Brimblecombe, 2025, *Can Indonesia cover all older persons with a public pension scheme?*, *Brief*, International Labour Organization, Jakarta.

G. Dokumen/Laporan Lembaga

Badan Pusat Statistik, “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2025”, Berita Resmi Statistik No. 21/02/Th. XXIX, Jakarta, 5 Februari 2026, <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=3IwwQYtXDym8eOjEi2cN525mZF13RCticUFaY1huZzJibFQ1dnA3ZjVjc1FINjlxUitMU0hLeHZiN0k3YmJ6SkR0cVJJLzVrdTU2N21DZlpEd2FpdjJ5T2JNdS84Q1N3NVEwMFI BRUg4b0paMmpvUVBTVEozS3VMazVGB2orbjAxY3VSM2c4dXd6WFBkVEh4RjVEb0hMeUdDVmI2K3dyQ2IxbkNIQT09> (diakses pada 11 Maret 2026)

Badan Pusat Statistik, “Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025”, Jakarta, Desember 2025, <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/868d335b088dcdde3ddee052/statistik-penduduk-lanjut-usia-2025.html> (diakses pada 6 Maret 2026).

BPJS Ketenagakerjaan, “Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018”, Jakarta, Desember 2018, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-terintegrasi.html> (diakses pada 10 Maret 2026).

BPJS Ketenagakerjaan, “Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024”, Jakarta, Desember 2024, https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_tahunan/Laporan_Terintegrasi_BPJS_Ketenagakerjaan_2024_5mb_publish.pdf (diakses pada 10 Maret 2026).

United Nations, “Enhancing social protection and reducing vulnerability in a globalizing world”, New York, Desember 2000,

<https://digitallibrary.un.org/record/431527?v=pdf> (diakses pada 10 Maret 2026).

H. Artikel Berita

Maulana, Aditya, “Buruh Demo di HI, Minta PP JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut,” *Detik News*, 3 Juli 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2959942/buruh-demo-di-hi-minta-pp-jht-cair-di-usia-56-tahun-dicabut> (diakses pada 6 Januari 2026).

Mediana, Caecilia, “BPJS Ketenagakerjaan: Setiap Tahun, Lebih dari 50 Persen Klaim JHT karena ‘Resign’,” *Kompas.id*, 25 April 2025, <https://www.kompas.id/artikel/bpjs-ketenagakerjaan-setiap-tahun-lebih-dari-50-persen-klaim-jht-karena-resign> (diakses pada 4 September 2025).

Mediana, Caecilia, “Konfederasi Serikat Buruh Desak Reformasi Jaminan Sosial, Soroti Pekerja Informal”, *Kompas.id*, 26 Februari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/9-konfederasi-serikat-buruh-desak-reformasi-jaminan-sosial-soroti-pekerja-informal> (diakses pada 12 Maret 2026).

Perdana, Aditya Putra, “Terlalu Banyak Energi Keluar, Buruh Tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022”, *Kompas.id*, 15 Februari 2022, <https://www.kompas.id/artikel/terlalu-banyak-energi-keluar-buruh-tolak-permenaker-2-tahun-2022> (diakses pada 24 September 2025).

Pradana, Whisnu, “Buruh Tolak Permenaker No 2 Tahun 2022, FSPMI: JHT itu Uang Pekerja!,” *Detik News*, 15 Februari 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5942996/buruh-tolak-permenaker-no-2-tahun-2022-fspmi-jht-itu-uang-pekerja> (diakses pada 8 Januari 2026).

Yuniarto, Topan, “Generasi ‘Sandwich’: Definisi, Beban, dan Tantangan”, *Kompas Pedia*, 22 Mei 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/generasi-sandwich-definisi-beban-dan-tantangan> (diakses pada 11 Maret 2026).

“Diam-Diam, Ratusan Ribu Buruh Kena PHK”, *Kompas.com*, 11 Desember 2008, <https://nasional.kompas.com/read/2008/12/11/08503327/diam-diam-ratusan-ribu-buruh-kena-phk> (diakses pada 2 Februari 2026).

“Mengenal JKP, Pengganti JHT yang Cair saat Peserta BPJS Usia 56 Tahun,” *CNN Indonesia*, 12 Februari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220212144744-78->

[758360/mengenal-jkp-pengganti-jht-yang-cair-saat-peserta-bpjs-usia-56-tahun](#) (diakses pada 21 Januari 2026).

I. Internet

BPJS Ketenagakerjaan, “Berapa Besaran Iuran JHT, JKK, JKM, JP dan JKP?”, 17 Desember 2025, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18913/artikel-berapa-besaran-iuran-jht,-jkk,-jkm,-jp-dan-jkp> (diakses pada 10 Maret 2026).

Central Provident Fund Board, “CPF Overview: How CPF works”, Government of Singapore, 2 Januari 2026, <https://www.cpf.gov.sg/member/cpf-overview> (diakses pada 10 Maret 2026).

Department of Statistics Malaysia, “Employee Wages Statistics (Formal Sector), First Quarter 2025”, 28 Juli 2025, <https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/employee-wages-statistics-formal-sector-first-quarter-2025#:~:text=The%20median%20monthly%20wage%20of,January%2C%20February%20and%20March%20respectively> (diakses pada 10 Maret 2026).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Filsafat”, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/filsafat> (diakses pada 2 Maret 2026).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Sosiologi”, <https://kbbi.web.id/sosiologi> (diakses pada 6 Maret 2026).

Kementerian Ketenagakerjaan, “Upah Minimum Provinsi Tahun 2025”, Satu Data Kemnaker, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2252> (diakses pada 11 Maret 2026).

Ministry of Manpower, “What is the Central Provident Fund”, Government of Singapore, 23 Juli 2025, <https://www.mom.gov.sg/employment-practices/central-provident-fund/what-is-cpf> (diakses pada 10 Maret 2026).

Ministry of Manpower, “Summary Table: Income”, Government of Singapore, 27 Februari 2026, <https://stats.mom.gov.sg/pages/income-summary-table.aspx> (diakses pada 10 Maret 2026).

Munawaroh, Nafiatul, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, Hukumonline.com, 20 Juni 2024,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/> (diakses pada 6 Maret 2026).

Nabilah Muhamad, “Biaya Kebutuhan Hidup Layak di 38 Provinsi Indonesia pada 2025”, databoks, 23 Desember 2025, <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/694a5004e1602/biaya-kebutuhan-hidup-layak-di-38-provinsi-indonesia-pada-2025> (diakses pada 11 Maret 2026).

Prudential, “Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) in Malaysia: A Complete Guide”, Prudential Malaysia, <https://www.prudential.com.my/en/insurance-101/all-stories/employees-provident-fund-malaysia/> (diakses pada 10 Maret 2026).

StashAway, “Complete Guide to EPF Withdrawal: How and When to Withdraw Money from KWSP”, 29 September 2025, <https://www.stashaway.my/r/complete-guide-epf-withdrawal> (diakses pada 10 Maret 2026).